

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional mengupayakan dalam mencapai perkembangan perekonomian yang tinggi dan pembangunan ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan pembangunan ekonomi yang dapat diamati dan dianalisis dalam skala nasional dan regional, sehingga pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses keterkaitan dan pengaruh timbal balik dan Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan akan tercipta jika terjadi pemerataan dalam pembangunan. Tetapi yang terjadi dalam proses pembangunan adalah terjadinya ketimpangan, pembangunan ekonomi antara wilayah dapat mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Dimana semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat dan akan meningkatkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memberi efek cucuran ke bawah pada perekonomian suatu wilayah.

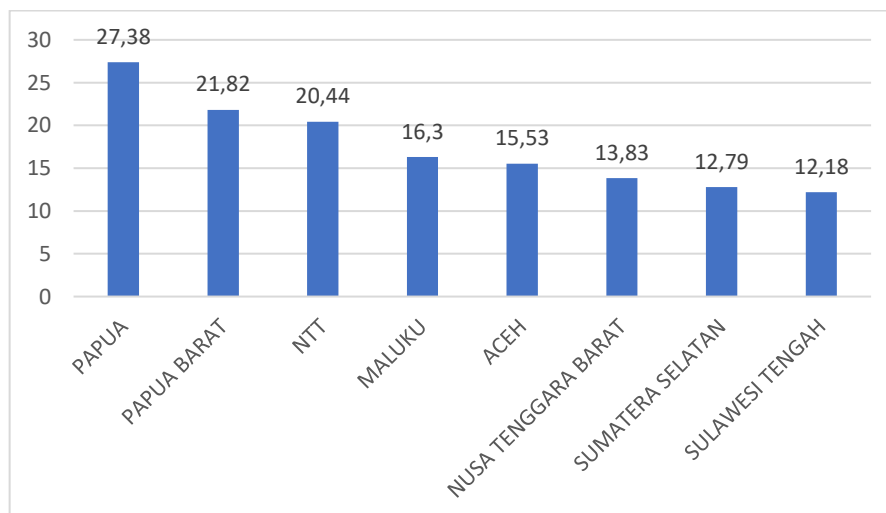
Syahputra (2017). Menyatakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan peningkatan perekonomian pada tingkat daerah. Dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah membuat rencana yang membahas pokok bahasan tentang pembangunan daerah. Rencana itu tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan untuk nasional disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Prioritas pembangunan

ekonomi daerah, permasalahan yang terjadi di daerah dan cara penanggulangannya dijelaskan dalam rencana tersebut selama lima tahun kedepan untuk jangka menengah dan dua puluh tahun untuk jangka panjang. Tujuan adanya RPJMN/D yaitu mewujudkan daerah yang berdiri sendiri dan berkembang melalui kekayaan alam yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Salah satu prioritas utama dalam rencana daerah atau nasional adalah masalah kemiskinan.

Hindalani (2019) menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia telah terjadi sejak lama. Penanggulan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Pada cara pengurangan kemiskinan di Indonesia, tidak hanya dengan penerobosan strategi serta pada kementerian dan lembaga, apalagi dibuat instansi eksklusif Tim Nasional PENCEPATAN Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut TNP2K dalam (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 2016) penurunan kemiskinan pernah terhenti karena adanya katagangan finansial Asia tahun 1997-1998.

Otonomi daerah pemerintah pusat mengemukakan wewenang untuk pemerintah daerah baik itu dari segi ruang lingkup daerah tersebut. Hal itu sudah tercantum pada UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan otonomi daerah hak, otoritas serta keharusan daerah otonomi dalam menyusun serta mengelola individu kepentingan pemerintahan serta kepentingan penduduk lokal berimbang melalui hukum perundangan. Akan tetap, berbagai pokok permasalahan seperti kemiskinan belum bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan suatu perekonomian dalam negara berkembang yang harus diselesaikan oleh Negara itu sendiri. Hal ini dibuktikan masih besarnya persentasi

jumlah penduduk miskin yang dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, minimnya peluang kerja, serta kurangnya akses terhadap sumber daya dan infrastruktur. Maka dampak dari kemiskinan ini sangat merugikan masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, serta pendidikan yang berkualitas. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2022 juga menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional pada maret 2022 sebesar Rp 486,17 ribu. Mengartikan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dibawah garis kemiskinan yakni pada tahun 2022 sebesar Rp 9,54% dari total penduduk di Indonesia. Dimana terlihat bahwa penduduk miskin terbanyak terdapat pada wilayah pedesaan sebesar Rp 17,149,920 ribu jiwa. Sedangkan di wilayah perkotaan penduduk miskin sebesar Rp 11, 949, 800 ribu jiwa.



**Grafik 1 1Tingkat Kemiskinan Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2022.**

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.**

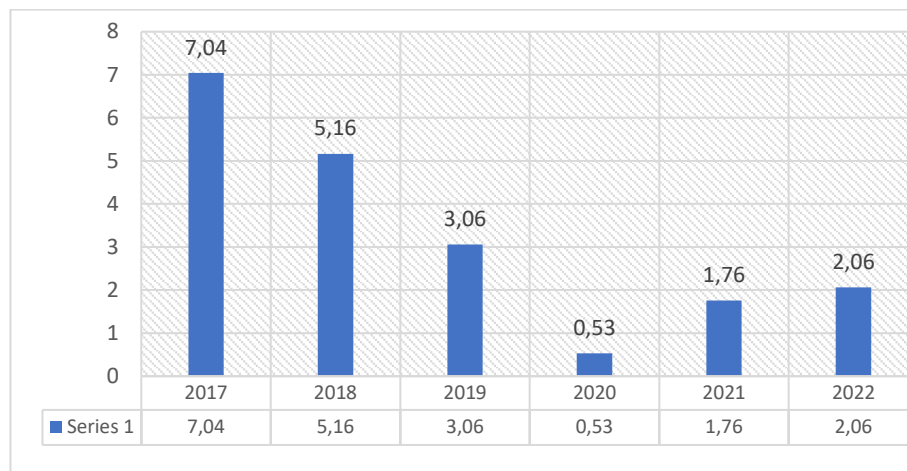
Pada **grafik 1.1** persentasi kemiskinan Provinsi Papua Barat berada pada posisi kedua dari seluruh provinsi sebagai persentasi kemiskinan tertinggi setelah Provinsi Papua yaitu 21,82%. Persentasi tersebut masih jauh dibandingkan dengan Sulawesi Tengah sebagai persentasi kemiskinan terendah pada tahun 2022 sebesar 12,18%. Tahun 2018 keadaan kemiskinan di Provinsi Papua Barat tingkat persentase kemiskinan sebesar 23,01%. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya belum membuat Provinsi Papua Barat keluar dari provinsi dengan tingkat persentasi kemiskinan tertinggi. Indonesia perlu mendalami tentang persoalan yang terjadi di setiap daerah terutama masalah kemiskinan. Dalam melakukan rencana pembangunan ekonomi di Indonesia kemiskinan selalu dikutsertakan, hal ini terjadi karena kemiskinan merupakan salah satu pokok utama yang perlu diselesaikan bagi pemerintah pusat atau daerah. Dasarnya pemerintah telah mengupayakan beraneka macam agar dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai program yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat dilakukan agar kemiskinan di Indonesia semakin berkurang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan yang melibatkan serangkaian kombinasi proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, seperti peningkatan pendapatan per kapita yang berlangsung lama. Dan faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis dalam skala nasional dan regional, sehingga pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses keterkaitan dan pengaruh timbal balik.

Mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Dimana semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat dan akan

meningkatkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lain pertumbuhan ekonomi memberi efek cucuran ke bawah atau trickle down effect pada perekonomian suatu wilayah. Namun pada penelitian (Anzwar, 2016) bahwa sebagian besar negara sedang berkembang termasuk Indonesia, baik di tingkat nasional ataupun regional, hanya terdapat suatu golongan masyarakat tertentu saja yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan adanya manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bersifat inklusif yang kemudian akan mengakibatkan memburuknya kemiskinan dan ketimpangan.

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode-tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut dimana Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan dalam suatu daerah dari berbagai macam Sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dalam daerah tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat masih belum stabil jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi wilayah seluas  $87.023,66 \text{ km}^2$  ini dapat dikatakan stabil. maka **grafik 1.2** di bawah ini menunjukkan hal ini.



**Grafik 1 2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 - 2022.**

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, 2023.**

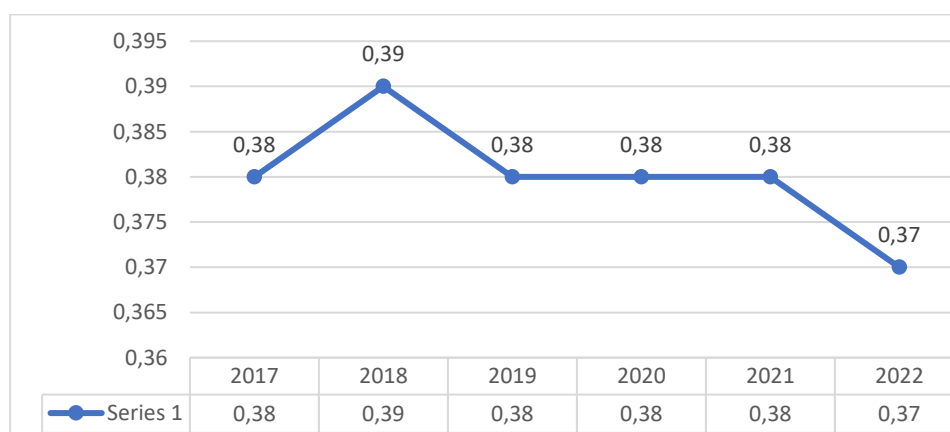
Berdasar data **grafik 1.2** tersebut di atas, dapat di jelaskan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat berfluktuasi antara tahun 2017 dan 2022. Pada tahun 2017 terlihat peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat rata-rata sebesar 7,04% persen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat cukup renda berada dalam lever yang paling renda mencapai 0,53% persen. Diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk, tenaga kerja. Penduduk bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh kualitas dan kesempatan kerja akan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan juga akan menyebabkan penurunan angka penduduk produktif yang mana penduduk menanggung penduduk non produktif. Yang mana apabila

terjadi peningkatan angka Ketimpangan maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena tanggungan usia produktif akan meningkat dengan demikian produktifitas masyarakat akan menurun.

Terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat pada tingkat daerah menunjukkan kesenjangan. Dimana Kabupaten Kota Sorong memiliki pertumbuhan yang terlalu besar dibanding Kabupaten dan kota lain. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki keunggulan pada sektor (Minyak bumi) dengan adanya minyak, sehingga Kabupaten kota Sorong memiliki pendapatan daerah yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat sebagian besar ditopang oleh pendapatan sektor pertambangan dan Penggalian yaitu pada 2022 18,49% diikuti sektor konstruksi 13,78% dan sektor Industri Pengolahan 26,76% . Selanjutnya, dimasing-masing Kabupaten/Kota di Papua Barat pada tahun 2017-2022 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Diketahui bahwa, di Kabupaten kota Sorong pada tahun 2018 mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 36,20% serta penurunan terendah juga terdapat di Kabupaten kota Sorong, hal ini tidak terlepas dari pendapatan PDRB Kabupaten kota Sorong yang sebagian besar di topang oleh sektor (minyak bumi).

Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam suatu rumah tangga disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima. Memburuknya kemiskinan yang banyak dimana jumlah anggota keluarga miskin akan semakin meningkat. Menurut (Sugiyanto, 2015) menyatakan hubungan ketimpangan dan kemiskinan adalah hubungan pragmatis, yakni kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan. Ketimpangan di suatu daerah akan memunculkan suatu masalah seperti peningkatan migrasi,

tindakan kriminal dan konflik antar penduduk (Fahrizal, 2019). Pada tahun 2021 Provinsi Papua Barat menjadi provinsi ketimpangan distribusi pendapatan kesepuluh tertinggi se Indonesia setelah Provinsi Bali dengan nilai ketimpangan sebesar 0,375%. Maka Provinsi Papua Barat berada pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Lalu, pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di masing-masing daerah administratif baik Kabupaten/Kota, memiliki nilai berbeda-beda. **Grafik 1.3** menunjukkan Gini Ratio di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 (%).



**Grafik 1 3 Gini Rasio di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 - 2022.**

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, 2023.**

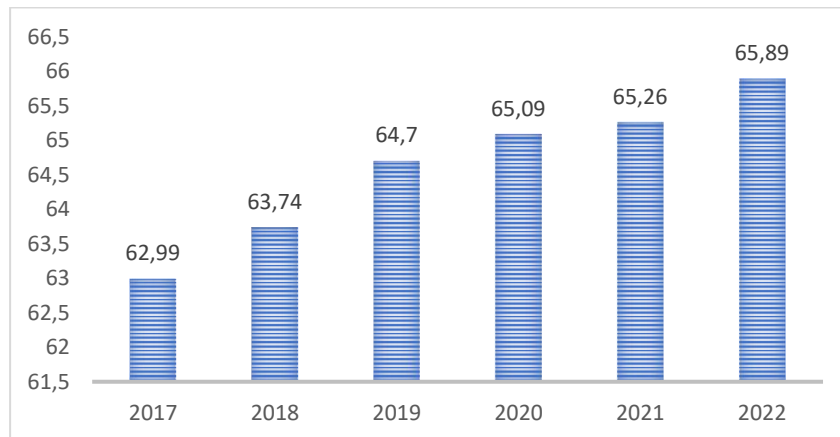
Kenaikan rasio gini terjadi pada saat Provinsi Papua Barat terpukul keras oleh guncangan ekonomi, seperti terlihat pada **Grafik 1.3** dengan melihat ketimpangan yang terjadi antara tahun 2017 dan 2022. Rasio gini tertinggi meningkat menjadi 0,39 persen pada tahun 2018, sedangkan rasio gini terendah turun menjadi 0,37 persen pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan pada ketidakmerataan pada pendistribusian pendapatan penduduk pada masing-masing daerah. Dimana Kabupaten Kaimana dengan ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi sebesar 0,43% dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan distribusi pendapatan terendah sebesar 0,27%.

Menurut (Agustina, 2018) terdapat tiga penyebab terjadinya kemiskinan, Pertama, kemiskinan terjadi akibat adanya ketidaksamaan pemilik sumber daya sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian, disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah sehingga produktivitasnya rendah yang akan menurunkan tingkat upah. Selanjutnya, diakibatkan oleh banyaknya modal yang memiliki. Dimana, tiga faktor kemiskinan itu dapat dijelaskan dengan lingkaran setan (*Vicious Cycle*). Kualitas penduduk atau sumberdaya yang baik dapat mempengaruhi jalannya roda perekonomian.

Kualitas sumberdaya manusia secara umum diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Besar kecilnya produktivitas penduduk digambarkan oleh tinggi rendahnya IPM. Semakin tinggi IPM akan mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan akan mempengaruhi peningkatan terhadap tingkat pendapatan penduduk. Sebaliknya, jika IPM rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya IPM dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang menentukan produktivitas dan mendorong tingkat pendapatan.

Sebagai indikator penting dalam pembangunan, indeks pembangunan manusia menjadi standar dalam mengamati apakah negara atau daerah itu mempunyai pembangunan manusia baik ataupun tidak. (Pelenewen *et al.*, 2018) menyatakan bahwa IPM menjelaskan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hasil pembangunan dan demikian mendapatkan penghasilan, kesehatan, pendidikan, serta sebagainya. Modal manusia melalui tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, secara tidak langsung akan memberikan pendapatan kepada masyarakat, yang selanjutnya pendapatan yang diterima dapat membantu

masyarakat keluar dari kerentanan kemiskinan. **Grafik 1.4** di bawah ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat terus meningkat.



**Grafik 1 4 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 - 2022.**

**Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2023.**

Data di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan IPM paling rendah se Indonesia, namun dalam rentang waktu 2020-2022 Provinsi Papua Barat dapat meningkat pada taraf sedang. Pada tahun 2020 sebesar 64,09% yang mengartikan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat masih rendah. Namun pada tahun 2021 sebesar 65,26%, dan tahun 2022 sebesar 65,89% IPM di Provinsi Papua Barat sudah berada taraf pada pembangunan manusia sedang. Hal tersebut tidak terlepas dari perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan. Walaupun saat ini indeks pembangunan manusia di Papua Barat berstatus sedang akan tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain masih tertinggal jauh Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat menunjukkan hal ini. pada barisan kedua terendah setelah Provinsi Papua. Pendidikan, kesehatan dan pendapatan

termasuk bagian dari indikator untuk menentukan pembangunan manusia. Perkembangan sumber daya manusia bisa dilaksanakan melalui meningkatkan investasi pada manusia. Perkembangan manusia pada Indonesia memiliki ciri untuk mengurangi kemiskinan (Lutfi, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas selanjutnya penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh dari ketiga variabel terhadap tingkan kemiskinan dan bagaimana ketiga variabel tersebut bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Dari latar belakang tersebut penulis membuat judul **“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta batasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022?
2. Apakah Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah dan instansi. Diharapkan adanya penelitian ini pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengentasan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat.
2. Bagi peneliti berikutnya. Diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Sebagai sarana pemaparan informasi yang telah penulis pelajari dari perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo Madura.